ARZUSIN
Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar

e-ISSN : 2809-4093
p-ISSN : 2809-4484

Terindeks: Crossref, Dimensions, Scilit, Garuda, Google Scholar, Moraref, Base, OneSearch, etc.

https://doi.org/10.58578/arzusin.v2i1.244

MENEROPONG ARUS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Erik Purwanti[1], Adam Baustin Erlangga[2], Niar Agustian[3], Muhamad Afadh[4]
Universitas Ahmad Dahlan
erik1800331008@webmail.uad.ac.id

Abstract

Indonesia is a country that has pluralistic diversity. These varieties can be viewed from two perspectives, namely a horizontal perspective and a vertical perspective. The horizontal perspective covers the diversity of religion, ethnicity, regional language, clothing, food, and culture. The vertical perspective includes differences in education level, economy, place of residence, occupation and socio-cultural diversity. The diversity of our nation makes us pay attention to the importance of multicultural education in anticipation of negative social phenomena that may come from diversity, race, ethnicity, religion, and the diversity of values that exist in society. Multicultural education can be implemented through a learning model substantially by acknowledging and respecting cultural diversity.

Keywords: *Pluralistic, Multicultural Education, Islamic Education*

Abstrak : Indonesia merupakan negara yang mempunyai keragaman yang pluralistik. Varietas tersebut bisa ditinjau dari 2 perspektif yaitu perspektif horizontal dan perspektif vertikal. Perspektif horizontal meliputi keragaman agama, suku, bahasa daerah, sandang, pangan, dan budaya. Perspektif vertikal mencakup perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, tempat tinggal, pekerjaan dan keragaman sosial budaya. Keanekaragaman bangsa kita membuat kita perhatian akan pentingnya pendidikan multikultural sebagai antisipasi terhadap fenomena sosial negatif yang mungkin berasal dari keragaman, ras, suku, agama, dan keragaman nilai yang ada pada masyarakat. Pendidikan multikultural bisa dilaksanakan melalui model pembelajaran secara substansial dengan mengakui serta menghormati keragaman budaya.

Kata Kunci : Pluralistic, Multikultural Pendidikan, Pendidikan Islam

Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Ali Maksum menjelaskan bahwa kebhinekaan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu; perspektif horizontal dan vertikal. Perspektif horizontal meliputi perbedaan agama, suku, bahasa daerah, pakaian, makanan dan adat. Sementara itu, dari perspektif vertikal meliputi perbedaan pendidikan, ekonomi, kemapanan, pekerjaan dan tingkat sosial. (Maksum & Ruhendi, 2004)

Keanekaragaman budaya Indonesia didukung oleh sekitar 300 suku bangsa, 200 bahasa daerah dan ribuan aspirasi budaya. (Assegaf, 2011) maka pada proses interaksi antar etnik di negara kesatuan ini harus disertai dengan toleransi yang tinggi terhadap keberadaan budaya lain Toleransi inilah yang nantinya akan digunakan dalam proses adaptasi budaya sebagai sebuah out put yang bijaksana dan bebas konflik, sehingga kita mengenal ungkapan bijak dari "dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung." Secara historis, kesadaran akan realitas keragaman ini, khususnya keragaman agama, telah ditunjukkan secara legal dan resmi oleh para Founding Fathers dengan memasukkan nilai-nilai pluralistik agama ke dalam ekspresi Pancasila dan UUD 1945. Sebagai dasar negara. Demikian pula, berbagai jenis budaya diidentifikasi dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ikka". Semua ini menunjukkan pemahaman tentang multikulturalisme di antara para pendiri negara. Padahal, secara sosial budaya, Indonesia merupakan prototipe masyarakat pluralistik yang ideal.

kemudian di era reformasi, pemberlakuan UU RI No 32/2004 tentang otonomi daerah, memberikan peluang yg besar bagi kemultikulturan di Indonesia. dengan penerapan UU ini diharapkan dapat mengantar masyarakat kepada suasana rukun, dan saling menghormati tanpa ada perseteruan, kekerasan serta meghilangkan kompleksitas disparitas yang ada. Namun, pemberian ruang bagi multikulturalisme pada masa reformasi yang ditandai dengan otonomi daerah ternyata bermasalah, karena yang muncul di era otonomi adalah perlombaan untuk menciptakan kebijakan dari sudut pandang multikulturalisme menjadi paradoks.

Sejak beberapa dekade ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada isu-isu disintegrasi bangsa seperti Munculnya kerusuhan dan berbagai konflik di beberapa daerah Indonesia yang disinyalir bernuansa SARA. Ditambah lagi bahwa aksi-aksi

kekerasan yang terjadi dilakukan oleh oknum-oknum atau ormas-ormas yang berlabelkan dan mengatasnamakan agama. Aksi-aksi kekerasan tersebut sekaligus menggambarkan sikap intoleransi yang lebih mendominasi terhadap perbedaan agama, etnik dan budaya. Seperti pemboman dan pembakaran rumah-rumah ibadah agama lain, penyerangan dan pengrusakan terhadap komunitas Ahmadiyah, termasuk pengrusakan atas tempat-tempat hiburan, kafe-kafe, diskotik, rumah pelacuran dan tempat-tempat lainnya yang dipandang bertentangan dengan norma-norma atau budaya tertentu, dan lain-lain.

Maka dari itu sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem pendidikan di Indonesia terutama agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan kerena suku, ras, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Dalam makalah yang singkat ini, penulis mencoba untuk mengetengahkan beberapa pandangan terkait persoalan tersebut serta berdasarkan beberapa tinjauan yang merupakan hasil survei terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan penelitian perpustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian perpustakaan. Sumber data penelitian ini berasal dari buku maupun jurnal di bidang Pendidikan Agama Islam, Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pengamatan yang berkesinambungan dari berbagai sumber, baik secara manual maupun digital. Data yang dikumpulkan kemudian dikurangi, ditampilkan, dan verifikasi. Analisis data dilakukan dengan mengatur data, memecahnya menjadi unit, melakukan sintesis, mengatur ke dalam pola, memilih apa yang penting dan dipelajari, dan menarik kesimpulan apa yang harus disoraki orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dari Konsep Multikultural

Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikulturalisme juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Dalam pengertian yang lebih mendalam istilah multikulturalisme bukan hanya pengakuan terhadap budaya (kultur) yang beragam, melainkan juga pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politik, sosial, ekonomi dan lainnya.

Konsep tentang multikulturalisme, sebagaimana konsep-konsep ilmu sosial dan kemanusiaan yang tidak bebas nilai, tidak luput dari pengayaan ataupun penyesuaian ketika dikaji untuk diterapkan. Demikian pula, konsep ini masuk ke Indonesia, yang dikenal dengan sosok keberagamannya. Multikulturalisme bertujuan untuk kerja sama, kesederajatan, dan mengapresiasi dalam dunia yang kian kompleks dan tidak monokultur lagi.

Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Multikulturalisme berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan mauatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu.

Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat dipahami sebagai pandangan dunia yang diwujudkan dalam kesadaran politik.

Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Kata multikultural menjadi pengertian yang snagat luas, bergantung pada konteks pendefinisian tersebut. Dalam kebudayaan multikultural setiap individu memiliki kemampuan berinteraksi dan bertransaksi meskipun latar belakang kultur masing-masing berbeda. Hal ini disebabkan sifat manusia, antara lain akomodatif, asosiatif, adaptable, fleksibel, dan kemauan untuk saling berbagi. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa keberagaman kultur mengandung unsur jamak serta sarat dengan nilai-nilai karifan. Dalam konteks membangun tatanan sosial yang kukuh, nilai-nilai kearifan itu dapat dijadikan sebagai sumbu pengikat dalam berinteraksi dan bersosialisasi antar individu atau antar kelompok sosial.

Berdasarkan pandangan dan konsep tersebut, multikulturalisme memiliki relevansi makna dan fungsi yang tepat. Oleh sebab itu, konsep tersebut menjadi penting dikembangkan dan diinternalisasikan dlaam proses transformasi nilai-nilai bagi masyarakat bangsa yang beragam. Prinsip-prinsip dasar multikulturalisme yang mengakui dan menghargai keberagaman akan sangat membantu bagi terjadinya perubahan format perilaku sosial yang kondusif dan menjanjikan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

B. Pancasila Sebagai Bingkai Multikulturalisme

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila adalah landasan idiologi Bangsa Indonesia. Dimana Bangsa ini terdiri dari berbagai macam suka,adat,agama dan budaya yang antara satu dengan yang lainya saling membawa perbedaan (multicultural). Namun demikian multikulturalisme dapat dipahami sebagai pengakuan tentang keaneka ragaman dari masyarakat yang majemuk, heterogen dan plural.Sebagai Bangsa yang besar dan dipenuhi dengan perbedaan (multikulturalisme) tidak saja diakui tetapi juga bisa diterima akan adanya perbedaan suku, agama, ras, antar golongan dan Etnis.

Masyarakat Indonesia harus mampu hidup berdampingan antara satu dengan yang lainya,sehingga harmonisasi yang selama ini didambakan oleh Bangsa Indonesia bukan sekedar khayalan tetapi sungguh sungguh diterapkanya ididologi pancasila sebagai lansdasan dasar kehidupan sehingga hidup aman damai dalam bingkai kebinekaan itu benar benar terwujud. Adanya Pancasila juga sebagai solusi dari adanya konflik yang terjadi antara golongan Nasionalis dan agama,Pancasila telah mampu menunjukkan fungsinnya sebagai pemersatu Bangsa yang penuh dengan kemajemukan. (Mu'id & Shofa, 2016)

Keragaman kondisi geografis ,flora dan fauna,hingga aspek social dan budaya di Indonesia hanya dapat dirajut dalam bingkai kebangsaan yang inklusif. Oleh karena itu Pancasila lahir sebagai bingkai untuk merajut keragaman dan semua perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan dan melahirkan sebuah kekuatan untuk Bangsa ini.Pancasila dengan kandungan nilai nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong dalam keragaman menjadi satu anugerah.untuk itu,Pancasila sebagai suatu keyakinan dan pendirian yang asasi harus terus diperjuangkan. Dan Pancasila perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi "Politik Harapan" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan harapan kita semua dapat konsisten merealsasikan Pancasila sebagai dasar negara, idiologi bangsa,dan pandangan dunia yang dapat membawa kemajuan dan kebahagiaan seluruh Bangsa Indonesia.

Adapun faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain; Letak strategis wilayah Indonesia.

1. Kondisi Negara kepulauan.
2. Perbedaan kondisi alam.
3. Keadaan transportasi dan komunikasi.
4. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan.

Dari keberagaman tersebut tentu memiliki dampak,baik atau dampak yang positif maupun dampak negative, Baik berdampak untuk diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara. Adapun dampak positif yang ditimbulkan

yaitu keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya adalah mengakibatkan ketidak harmonisan banyaknya perpecahan antar suku, atau penganut agama sehingga sehingga kekuatan Bangsa akan menurun atau menjadi lemah.

Sebagaimana tertera dalam Pancasila yaitu sebuah kata yang sangat indah "BHINEKA TUNGGAL IKA" yang memiliki arti meskipun berbeda beda tetapi tetap satu.semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keragaman suku, adat, agama, budaya, dan ras. (Kantor Public Komunikasi, 2019)

C. Pendidikan Multikultural dalam Konteks Pendidikan Nasional

Sebagai sebuah gagasan, pendidikan multikultural pertama kali dibahas pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menyerukan perhatian terhadap hak-hak sipil di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat (The Civil Rights Movement). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi terhadap kelompok minoritas mayoritas di tempat umum, rumah, tempat kerja dan lembaga pendidikan. Gagasan multikulturalisme ini dilatarbelakangi dari asumsi bahwa tiap manusia memiliki ciri-ciri, sejarah, pengalaman hidup dan kesamaan psikologis yg majemuk. (M. Ainul Yaqin, 2005) Atas dasar ini, kemajemukan agama, keragaman pandangan, pemikiran, peredaran, mazhab, partai, golongan, kultur serta tradisi merupakan sebuah keniscayaan atau sunnatullah yang tidak bisa ditolak. karena itu, hidup bersamaan dengan berbagai individu serta kelompok yang berbeda latarbelakangnya menjadi tidak dapat dihindari.

Dalam konteks Indonesia, wacana dan gagasan tentang pendidikan multikultural relatif baru bahkan asing bagi sebagian pendidik. Kalaupun tidak demikian, wacana di kalangan praktisi masih "melangit" dan tidak dipraktikkan di semua kurikulum lembaga pendidikan. Namun, keberadaannya tetap menjadi bahan perdebatan yang menarik. Beberapa pertimbangan dan pandangan terkait meningkatnya diseminasi topik dan

wacana pendidikan multikultural dalam konteks pendidikan nasional antara lain :

Pertama, berangkat dari paham multikulturalisme sebagai sebuah ideologi yang diyakini mempunyai peran yang besar dalam pembangunan bangsa. Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Fakta ini disadari sepenuhnya oleh Founding Father negara yang sangat disegani dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Keanekaragaman budaya bangsa Indonesia akan menjadi sumber inspirasi dan potensi untuk membangun suatu bangsa yang dapat mencapai cita-cita masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini, wacana multikulturalisme dimaknai sebagai paradigma untuk mengelola bentuk-bentuk keragaman yang lebih beragam dan menjadi potensi dalam proses konstruksi bangsa.

Kedua Multikulturalisme sebagai bentuk perlawanan terhadap monokulturalisme. Dominasi politik orde baru yang cenderung ke arah wacana monokulturalitas di hampir setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, telah membelenggu nilai-nilai multikulturalisme. Dalam konteks ini, munculnya multikulturalisme merupakan bentuk kritik terhadap hegemoni otoriter dan militeristik orde baru dengan idealisme monokulturalnya. Oleh karena itu, ketika kran demokrasi dibuka pasca runtuhnya sistem orde baru, hal itu sejalan dengan proses otonomi dan desentralisasi pemerintahan sejak 1999. (Mahfud, 2010) Fenomena "provinsi" sebagai upaya aktualisasi diri (melekat pada nilai dan jati diri) baik yang mengatasnamakan bangsa, budaya dan agama, tidak bisa lagi dikekang seperti cacing di perut Gunung Merapi. Sebab jika tidak dibarengi dengan wawasan multikulturalisme, maka akan menimbulkan perpecahan dan konflik horizontal. Seperti konflik di Timor Timur, Aceh, Ambon, Kalimantan, Papua dan lain-lain. Entah konflik itu muncul semata-mata karena perselisihan antara masyarakat itu sendiri, atau ada "dalang" dan provokator yang memulai konflik.

Hingga saat ini, masyarakat Indonesia masih diliputi ketakutan dan dibayangi berbagai macam konflik bernuansa SARA. Untuk mengantisipasi hal tersebut tentunya diperlukan sebuah model pendidikan. yaitu model pendidikan yang melembagakan falsafah multikulturalisme dalam sistem pendidikan dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, rasa hormat, penerimaan dan saling pengertian, serta komitmen etis terhadap urusan publik oleh masyarakat. (Zubaedi, 2010) Untuk itu dirasa sangat penting untuk memberikan pendidikan lintas budaya sebagai wacana baru dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya bagi peserta didik agar peka terhadap pengelolaan gejala-gejala permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan baik secara substansi maupun dalam model pembelajaran yang mengakui dan menghargai keragaman budaya. Menurut H.A.R. Tilaar, pendidikan lintas budaya memberikan pengembangan empat nilai; (1) menghargai realitas keragaman budaya dalam masyarakat, (2) mengakui martabat dan hak asasi manusia, (3) mengembangkan tanggung jawab masyarakat global, (4) mengembangkan tanggung jawab manusia terhadap bumi. (Tilaar, 2003)

Ketiga, arus dan gelombang yang terkait dengan konteks modern dan keberadaan multikulturalisme di sini semakin dalam akibat munculnya wacana postmodern atau lebih dikenal dengan Istilah "globalisasi". Menurut Brian S. Turner, globalisasi telah menyebabkan munculnya dimensi baru multikulturalisme yang menantang sebagian besar budaya dominan tradisional yang cenderung memposisikan diri sebagai superior dan inferior terhadap orang lain. Globalisasi mengakibatkan meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas budaya dengan menempatkan beragam tradisi dalam komunitas yang ada. (Amer, 2002)

Selain itu yang perlu digaris bawahi, bahwa multikulturalisme sudah menjadi komoditas politik dan terus bergulir pada ranah kebijakan sistem pendidikan nasional. Hal ini bisa dilihat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yang diikuti kebijakan pemerintah perihal pemberlakuan kurikulum KTSP dan pengelolaan kelembagaan

pendidikan pada bentuk MBS (Manajement Berbasis Sekolah) menjadi upaya otonomisasi pendidikan.

Fakta tersebut menimbulkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada potensi wilayah serta nilai-nilai budaya lokal (local wisdom). dari sistem pendidikan sentralistik berubah menjadi desentralistik. Kebijakan ini tidak terlepas dari munculnya pencerahan para tokoh serta pemimpin negeri ini bahwa bangsa indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk serta heterogen. oleh karena itu, tidak mungkin membangun negeri ini tanpa mempedulikan nilai-nilai kemultikulturalan yang terdapat pada rakyat.

D. Pendidikan Multikultural dalam Konteks Pendidikan Agama Islam

Pewacanaan terkait multikultural dalam area pendidikan formal (sekolah) ini semakin menguak. Adanya gagasan multikultural dipicu oleh penyebaran isu-isu pendahuluan banyaknya peristiwa bentrokan dan konflik yang ada di dalam masyarakat. Kemudian terdapat pihak-pihak yang kemudian menyuarakan gagasan ini lebih lantang dan diterapkan lebih dini dalam kurikulum pendidikan. Memang diharapkan bahwa dengan penerapan pendidikan multikultural ini agar peserta didik dapat paham bahwa mereka menyadari terkait adanya perbedaan-perbedaan yang mereka temui.

Keanekaragaman budaya merupakan semacam hal yang tidak dapat dihindari. Kita hidup dalam bingkai keragaman budaya dan merupakan bagian dari proses kemajemukan, aktif maupun pasif. Hal tersebut menyelam dan menyelinap di dalam sendi-sendi kehidupan kita, pun juga dalam hal kepercayaan. (Ibrahim, 2013) Memang sangat penting sekali untuk kita semua agar bisa belajar tentang yang namanya perbedaan, yaitu kita dapat mengimplementrasikan sikap toleransi untuk menjumpai hal-hal-hal yang sifatnya perbedaan kita dengan orang lain. Sikap toleransi itu sendiri merupakan kemampuan dari diri kita terkait belajar hidup dengan orang-orang lain yang berbeda dalam banyak hal. Tetapi yang harus di ingat oleh kita semua adalah kita harus bisa paham batas-batas dari toleransi itu sendiri.

Setidaknya selama 30 tahun terakhir, kebutuhan dan urgensi pendidikan multikultural semakin terasa di negara-negara multikultural, termasuk Indonesia. Di Indonesia, khususnya di era reformasi, otonomi dan desentralisasi yang sedang berlangsung, semakin terasa, dan juga disertai dengan berbagai konflik yang muncul di tanah air. Oleh karena itu, menurut penulis, tanpa pendekatan multikultural, perpecahan etnis yang semula dianggap sebagai ancaman, bisa menjadi kenyataan, dan konflik yang muncul tidak dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, pendekatan multikultural sangat cocok dan sesuai dengan perkembangan demokrasi yang sudah mulai berlangsung dan dapat menghilangkan konflik yang sering muncul.

Islam merupakan agama yang sempurna, semua hal baik itu yang sifatnya kecil hingga besar telah diatur oleh Islam, pun juga terkait dengan pendidikan multikultural :

Toleransi dan Belajar Hidup dalam Perbedaan

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. Al-Hujuraat:13)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya, laki-laki dan perempuan, dan menciptakan manusia berbangsa-bangsa, untuk menjalin hubungan yang baik. Kata ta'aarafu pada ayat ini maksudnya bukan hanya berinteraksi tetapi berinteraksi positif. Jadi, dijadikannya makhluk dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah dengan harapan bahwa satu dengan yang lainnya dapat berinteraksi secara baik dan positif. Lalu dilanjutkan dengan …inna akramakum 'indallaahi atqaakum.. maksudnya, bahwa interaksi positif itu sangat diharapkan menjadi prasyarat kedamaian di bumi ini. Namun, yang dinilai terbaik di sisi Allah adalah mereka itu yang benar-benar dekat kepada Allah.

Dialog dan Musyawarah

Dialog adalah pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan bersama, dengan komitmen untuk saling belajar agar dapat berubah, tumbuh dan berkembang. Maka dari itu pada tatanan masyarakat sifatnya penting untuk diterapkan terkait dialog dan musyawarah karena banyak hal yang bisa kita peroleh seperti musyawarah melatih kita untuk bisa menerima dan menghargai pendapat dari orang lain, dialog dan musyawarah juga melatih kita untuk paham perbedaan-perbedaan ytang ada misalkan perbedaan pendapat yang iku kita harus berlatih sprotif dalam menerimanya. Islam memandang dialog dan musyawarah dalam Firman Allah SWT:

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (Q.S, Ali 'Imran/3:159)

Apresiasi dan Interdependensi

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al-Maidah: 2).

Ayat ini menjelaskan bahwa penting sekali untuk memahami dan dapat menerapkan prinsip tolong-menolong di dalam kebaikan, manusia dapat memelihara dan menjaga solidaritas dan ikatan sosial (takwa), terlebih menjauhi tolong-menolong di dalam kejahatan. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa tolong-menolong yang dapat mengantarkan manusia, baik itu sifatnya individu ataupun kelompok pada masyarakat dan sebagaio upaya untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan antar umat yaitu

tolong menolong dalam hal kebaikan, kejujuran, dan ketaatan. Hal ini mengutamakan tatanan sosial yang dapat saling memahami dan penduli antar dalam masyarakat yang pada maknanya seluruh anggota masyarakat bisa saling berdampingan dengan erat dan menerapkan yang namanya apresiasi di dalam lingkungannya karena juga manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain. (Wahyudi & Hanafi, 2016)

Gagasan perlunya pendidikan multikultural juga dibahas dalam konteks pendidikan agama (Islam). Hal ini erat kaitannya dengan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Demikian pula berbagai bentuk konflik yang terjadi dalam nuansa SARA. Karena itu, pada Oktober 2001, Presiden Megawati Sukarno Puturi mendesak Kementerian Agama (Kemenag) mengembangkan model pendidikan agama yang berwawasan multicultural. (Zubaedi, 2007)

Ke depan, konflik antar peradaban sebenarnya tidak lagi disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, atau idealis, tetapi oleh masalah etnis, agama, kata Samuel P. Huntington dalam Clash of Civilizations. Idealisme rasial dan antarkelompok (SARA) yang akan memiliki telah "diprediksi". Pandangan atau "prediksi" ini tampaknya benar. Bahkan kerusuhan di Mesir baru-baru ini antara Muslim dan Kristen pasca penggulingan rezim otoriter penguasa Mesir Hosni Mubarak melihat kegelisahan dan konflik di beberapa wilayah Indonesia. Kerusuhan tersebut menelan puluhan korban jiwa dan merusak beberapa gereja.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini adalah menyelesaikan konflik antaragama. Masalah ini dilihat oleh banyak orang sebagai salah satu masalah moral terbesar abad ini, jadi menemukan cara yang dapat diterima untuk melakukan sesuatu sambil menghormati perbedaan agama sekarang merupakan kontribusi besar. Beberapa menganggap pemahaman multikulturalisme menjadi kontribusi yang paling tepat dan diinginkan untuk subjek perdebatan keragaman identitas.

Banyak pemikir dan cendekiawan Muslim, terutama yang berkecimpung dalam pendidikan Islam, mengkritik pola-pola yang diinginkan dari pendidikan agama Islam, terutama termasuk diskusi tentang pentingnya multikulturalisme dalam konteks pendidikan agama Islam. kualitas dari. pendidikan agama islam. Seperti Abdul Munir Mulkhan dalam bukunya "Kesalehan Multikultural" yang diterbitkan oleh Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah. Dalam buku ini, Munir sangat menolak konsep pendidikan Tauhid yang selama ini dipahami oleh umat Islam. Sebaliknya, ia mempresentasikan gagasan "pendidikan Islam multikultural. Menurut Munir:

"Kalau tetap berpegang pada rumusan pendidikan Islam (keagamaan) dan tujuan tauhid yang ada, perlu dicek makna dan rumusan fungsionalnya dan dikembangkan lebih lanjut dari segi kandungannya. Demikian Tuhan dan Islam. Kita mendapatkan rumusan yang satu doktrin atau kebenaran yang diyakini oleh orang percaya adalah universal. Oleh karena itu, Tuhan dan ajarannya, serta kebenarannya, juga diperoleh oleh penganut agama lain dan rumusan konseptual lainnya. Hasil rumusan di atas adalah bahwa dewa-dewa pemeluk agama lain sebenarnya adalah dewa-dewa Allah yang dimaksud dan diyakini oleh umat Islam. Kebenaran ajaran Tuhan yang diyakini oleh pemeluk agama lain sebenarnya adalah kebenaran yang diyakini oleh pemeluk agama Islam. (Mulkhan, 2005)

Pandangan Munir di atas adalah bahwa ia memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, ia ingin menyarankan bahwa sudah saatnya untuk mempertimbangkan masalah agama dari segi humanisme, bukan dari segi Islam, Kristen, Yudaisme, atau agama lain. Pandangan para pemikir lain, seperti Amin Abdullah, dalam karyanya adalah bahwa guru agama sekolah, yang bertindak sebagai pelopor pendidikan agama dari level terendah hingga tertinggi, mewacanakan gelombang dan topik pemikiran keagamaan, saya kira hampir tidak tersentuh. Tentang multikulturalisme dan multikulturalisme. Dalam hal ini, guru merupakan mediator pertama yang menyampaikan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme kepada siswa, yang kemudian berperan

aktif dalam mentransformasikan kesadaran toleransi secara lebih intensif dan skala besar. Amin menambahkan, ia bisa membayangkan kenyamanan, ketenangan, dan kualitas kedamaian umat-umat beragama.

Hal ini jamak ketika setiap orang secara sepihak dan secara pribadi mengklaim bahwa tradisi agama mereka sendiri adalah yang paling sempurna dan benar. Dan ketika klaim ini merasuk ke dalam ranah sejarah sosio-ekonomi, kedamaian yang didambakan yang dibutuhkan dan didambakan oleh agama dalam realitas sehari-hari terkikis dengan sendirinya. Dari sudut pandang metafisik-ontologis, klaim seperti itu dapat dimengerti, tetapi tidak selalu dibenarkan karena itu adalah salah satu inti agama yang sebenarnya. (Abdullah, 1996) Bahkan bimbingan agama yang diberikan kepada siswa masih mengandung banyak faktor yang menghambat kesadaran multikultural, seperti yang dikatakan Musya Asyar`i pada kompas pada 3 September 2004 :

> "Di sisi lain, saya merasa bahwa pendidikan agama di sekolah kita secara umum bukanlah pendidikan multikultural yang baik, tetapi sebaliknya. Akibatnya, konflik sosial terjadi di sekolah pedesaan yang dilanda konflik. Hal ini sering dipertegas dengan legitimasi UUD 1945."

Pendidikan Agama Islam (PAI) secara konseptual normatif pada umumnya lembaga pendidikan bertujuan untuk menumbuhkembangkan dan menumbuhkan sikap keberagaman dalam bentuk toleransi terhadap perbedaan suku, budaya dan agama antar peserta didik. Meskipun hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pendidikan agama Islam, tetapi dikatakan memainkan peran penting dalam pembentukan dan penghasutan sikap toleransi dan pengakuan penerimaan perbedaan etnis, budaya dan agama di antara siswa meningkat. (Weber, 2002)

Bahkan banyak yang menemukan bahwa pendidikan agama Islam membangun dan mengembangkan sikap toleransi dan kesadaran yang menerima perbedaan suku, budaya, dan agama yang sebenarnya manusiawi (manusiawi), saya putuskan gagal. Posisi kritis ini memunculkan wacana dan gagasan tentang perlunya memasukkan nilai multikulturalisme dalam

pendidikan agama Islam. Hampir semua masyarakat beradab Pluralisme sosial, budaya dan agama, namun pada kenyataannya masalah toleransi ini masih sering terjadi di masyarakat. (Ahmad, 2001)

Menurut Siti Malika Towaf, kelemahan pendidikan kepercayaan Islam yg berlangsung waktu ini, antara lain; 1) pendekatan masih cenderung normatif, pada mana pendidikan kepercayaan menyajikan kebiasaan-kebiasaan yg tak jarang tanpa gambaran sosial- budaya, sebagai akibatnya siswa kurang menghayati nilai-nilai kepercayaan menjadi nilai yg hayati pada keseharian, 2) kurikulum yg didesain hanya memberikan minimum kompetensi, namun pihak pengajar PAI tidakk jarang terpaku dengannya, sebagai akibatnya kreativitas buat memperkaya materi kurang tumbuh, begitu pula pada hal penerapan metode pembelajaran yang cenderung bersifat monoton. (Basri, 1999)

Dalam konteks ini pendidikan kepercayaan Islam lebih diposisikan secara pasif (cenderung Jabbariyah yang fatalisme), sebagai akibatnya pendidikan kepercayaan Islam menjadi suatu proses cenderung mengalami kebekuan & kekakuan pada implementasinya. Output yg dihasilkannya telah niscaya nir relevan menggunakan konteks zaman alias tertinggal, bahkan nir sporadis bertabrakan menggunakan syarat sosial yg terdapat & bisa memicu terjadinya pertarungan horizontal. Realitanya, masih saja dijumpai perlakuan-perlakuan diskriminatif terutama pada tatanan sosial-kemasyarakatan. Di kalangan umat Islam misalnya, selalu saja ada perilaku-perilaku yang menerangkan adanya kecurigaan & sentimen terhadap terhadap orang-orang lain yg tidak selaras kepercayaan . Begitu pula menggunakan komunitas lain, misalnya etnis China yg selalu tertutup & hanya berteman menggunakan sesama komunitasnya saja, & lain-lain.

Laporan survei LaKIP mengambarkan 62,7 % pengajar & 40,7 % anak didik menolak berdirinya loka ibadah non-Islam pada lingkungan mereka. Sebanyk 57,1 % pengajar & 36,9 % anak didik pula menolak bertoleransi pada seremoni keagamaan pada lingkungan mereka. Lebih jauh lagi, berdasarkan output survei itu pula ditemukan liputan yg menarik bahwa

21,1 % pengajar & 25,8 % anak didik menduga Pancasila nir lagi relevan menjadi ideologi negara. Pengajar & anak didik pun menduga Jika syariat Islam ditegakkan di Indonesia, masalah nasional akan terpecahkan (65%). Bahkan, menurut jajak pendapat Lakip, hampir 50% siswa mendukung perilaku radikal atas nama agama.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa nilai toleransi terhadap perbedaan suku, budaya, dan agama yang ada pada kelas Islam belum diharapkan. Dengan kata lain, pemahaman keagamaan yang dibangun melalui proses pendidikan agama Islam masih jauh dari nilai-nilai multikulturalisme, yang merupakan bagian dari nilai-nilai humanisme. Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeyakinan bahwa persoalan multikulturalisme merupakan persoalan yang sangat mendasar dan harus diperhatikan secara lebih serius dan mendalam dalam konteks pendidikan agama Islam. Tidak hanya wacana di dunia akademis, tetapi juga tatanan yang diadakan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Penulis menyatakan bahwa gagasan multikulturalisme dalam perspektif pendidikan agama (Islam) merupakan bentuk "pembaruan" dalam rangka reformasi dan respon terhadap tuntutan sosial di era perubahan (era demokrasi). pendapat dari. Oleh karena itu, perlu dikaji secara spesifik seperti apa pola penerapan dan kurikulumnya, seberapa baik guru Islam memahaminya, dan bagaimana mereka memandang multikulturalisme. Untuk memperjelas, mata kuliah ini memerlukan penelitian yang mendalam melalui pembentukan kerangka penelitian untuk benar-benar menghasilkan sesuatu yang akan membantu meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan agama Islam.

KESIMPULAN

Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikulturalisme juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Dalam

pengertian yang lebih mendalam istilah multikulturalisme bukan hanya pengakuan terhadap budaya (kultur) yang beragam, melainkan juga pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politik, sosial, ekonomi dan lainnya

Keragaman kondisi geografis ,flora dan fauna,hingga aspek social dan budaya di Indonesia hanya dapat dirajut dalam bingkai kebangsaan yang inklusif. Oleh karena itu Pancasila lahir sebagai bingkai untuk merajut keragaman dan semua perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan dan melahirkan sebuah kekuatan untuk Bangsa ini.Pancasila dengan kandungan nilai nilai inklusivitas,toleransi,dan gotong royong dalam keragaman menjadi satu anugerah.untuk itu,Pancasila sebagai suatu keyakinan dan pendirian yang asasi harus terus diperjuangkan.Dan Pancasila perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi "Politik Harapan" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,dengan harapan kita semua dapat konsisten merealsasikan Pancasila sebagai dasar negara, idiologi bangsa,dan pandangan dunia yang dapat membawa kemajuan dan kebahagiaan seluruh Bangsa Indonesia. Pendidikan Multicultural Dalam Perspektif Islam mencakup 3 hal, yaitu ;

1. Toleransi dan Belajar Hidup dalam Perbedaan
2. Dialog dan Musyawarah
3. Apresiasi dan Interdependensi

Pendidikan multikulturalisme dalam perspektif pendidikan nasional merupakan suatu keniscayaan, sebagai upaya dan langkah kongkrit dalam mentransformasikan nilai-nilai toleransi dan membangun kesadaran untuk dapat menerima perbedaan, etnis, budaya dan agama. Munculnya wacana dan pemikiran ini merefleksikan problem kontemporer yang tengah melanda bangsa ini yang dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa, manakala keragaman dan kemajemukan budaya yang ada di negeri ini tidak dikelola secara baik. Karena Indonesia sebagai suatu bangsa terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya dan agama.

Berdasarkan hasil survei dan argumentsi-argumentsi logis yang telah dikemukakan, keberadaan nilai-nilai multikulturalisme yang secara integral bagian dari nilai-nilai humanisme, dalam sistem pendidikan nasional dan dalam konteks pendidikan agama Islam sampai setakat ini masih sebatas dalam wacana, kajian

diskursus ilmiah terutama di kalangan para ilmuan dan pemikir Muslim. Sedangkan dalam tatanan implementasi dan aplikasinya cenderung diabaikan dan masih jauh dari yang diharapkan.

Kenyataan ini merekomendasikan untuk perlu dan segera dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang bagaimana implementasi pendidikan multikultural baik dalam sistem pendidikan nasional maupun dalam konteks pendidikan agama Islam. Bagaimana conten/ muatan kurikulum pendidikan multikultural, dan sejauh mana pemahaman guru serta bagaimana pandangannya terhadap pendidikan multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. A. (1996). Studi Agama Normativitas atau Historisitas. Pustaka Pelajar.

Ahmad, N. (2001). Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman. Kompas.

Amer, A.-R. (2002). Globalization and the Muslim World. Malita Jaya Publishing House.

Assegaf, A. R. (2011). Filsafat Pendidikan Islam; Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif. PT. Raja Grafindo.

Basri, C. H. (1999). Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi. Logos Wacana Ilmu.

Ibrahim, R. (2013). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. ADDIN, 07(01).

Kantor Public Komunikasi. (2019). Pancasila Bingkai Merajut Keberagaman. Universitas Padjajaran, 01(01).

M. Ainul Yaqin. (2005). Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan. Nuansa Aksara.

Mahfud, C. (2010). Pendidikan Multikultural. Pustaka Pelajar.

Maksum, A., & Ruhendi, L. Y. (2004). Paradigma Pendidikan Universal. IRCiSoD.

Mu'id, A., & Shofa, A. (2016). Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 01(01).

Mulkhan, A. M. (2005). Kesalehan Multikultural. PSAP Muhammadiyah.

Tilaar, H. A. R. (2003). Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Kultural. Pustaka Pelajar.

Wahyudi, W., & Hanafi. (2016). Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Islam. Batusangkar Internasional Confrence.

Weber, M. (2002). Sosiologi Agama. IRCiSoD.

Zubaedi. (2007). Pendidikan Berbasis Masyarakat, Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial. Pustaka Pelajar.

Zubaedi. (2010). Pendidikan Berbasisi Masyarakat. Pustaka Pelajar.